

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akhir Tahun 2019, bulan Desember, dunia mengumumkan adanya virus berbahaya, tersebar virus ini di dunia dan menularkan kesesama manusia lainnya dinamakan sebagai wabah Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*). Wabah Covid-19 pertama kali ditemukan dan berkembang di Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019. Covid-19 berhasil masuk dan menyerang bangsa Indonesia tepatnya pada awal tahun 2020, berawal hanya tiga orang yang dinyatakan positif terpapar SARS Cov 2 hingga menjadi ratusan ribu bahkan kini mencapai lebih dari satu juta orang yang terpapar virus ini di Indonesia, sebagian besar masyarakat berhasil disembuhkan tetapi beberapa orang harus berpulang karena terpapar virus SARS CoV 2 yang mematikan.

Pandemi Covid-19 menimbulkan keresahan tidak terkecuali masyarakat Indonesia. Dampak yang diakibatkan wabah ini melingkupi berbagai bidang, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan, bahkan aktifitas dan kebiasaan masyarakat sehari-hari terancam akibat adanya pandemi Covid-19. Bahkan angka kemiskinan dan angka pengangguran di Indonesia melonjak drastis karena adanya pandemi Covid-19. Adanya wabah Covid-19 ini membuat kerugian yang cukup besar untuk Indonesia, khususnya kerugian ekonomi.

Disisi lain, dampak Covid-19 sangat dirasakan oleh masyarakat Indonesia, baik masyarakat pedalaman, maupun masyarakat yang berdomisili di Ibu Kota serta kota-kota besar lainnya. Banyak perusahaan-perusahaan yang dengan sangat terpaksa mengurangi pekerjaannya, karena pendapatan yang didapat perusahaan-perusahaan tersebut lebih kecil dari sebelumnya. Selain itu, banyak juga toko-toko yang dengan terpaksa harus tutup, karena semakin berkurangnya pembeli. Tentu, hal tersebut sangat mempengaruhi perekonomian negara. Selain itu, kejahatan pun semakin hari semakin meningkat khususnya di Ibu kota, tidak sedikit masyarakat yang memilih jalan pintas untuk melakukan tindak kejahatan kriminal seperti mencuri, menjambret, atau

membegal demi mendapatkan beberapa lembar rupiah, untuk dapat menghidupi keluarga mereka.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia diharuskan melakukan penanganan secara efektif terhadap wabah Covid-19 serta dampak dari wabah Covid-19. Meskipun sudah terlanjur banyak yang terpapar virus ini, pemerintah Indonesia terus melakukan pencegahan, penanganan, pengobatan, serta pemulihan terhadap wabah Covid-19 ini. Karena bukan hanya dampak kesehatan yang didapatkan akibat adanya wabah Covid-19 ini, tetapi juga dampak sosial yang sangat dirasakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Ibu kota DKI Jakarta.

Selain dampak kesehatan dan dampak perekonomian yang sering menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah akibat adanya wabah ini, dalam sektor pendidikan juga sangat merasakan dampak dari wabah ini. Mulai dari kegiatan belajar mengajar yang diadakan secara daring atau online, membuat beberapa siswa kesulitan dalam mengikuti kegiatan belajar. Sebab, dengan dilaksanakannya kegiatan belajar mengajar secara daring, tentunya membutuhkan bantuan teknologi seperti *smartphone* dan kuota untuk melancarkan kegiatan belajar mengajar yang diadakan secara daring. Namun, tidak semua siswa bahkan guru yang memiliki *smartphone* atau bahkan tidak semua siswa dan guru yang mampu membeli *smartphone* agar dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar yang diadakan secara online.

Tingkat efektifitas belajar mengajar yang dilaksanakan secara online ini juga dianggap kurang efektif, karena keterbatasan waktu dalam penyampaian materi dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap siswa selama pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring ini juga sangat mempengaruhi. Sebab, kurangnya perhatian dan fokus siswa terhadap guru yang sedang memberikan pelajaran terhadap siswa. Namun, banyak siswa yang perhatiannya teralihkan dari pelajaran dan lebih mementingkan mengerjakan hal-hal yang tidak penting selama pelaksanaan belajar mengajar secara daring.

Dampak Covid-19 pada sektor pariwisata juga tidak luput dari ancaman. Data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik menjelaskan pada tahun 2019 pelancong asing asal China yang datang ke Indonesia menyentuh angka 2.07 juta pelancong atau

sebesar 12.8% dari jumlah keseluruhan wisatawan asing sepanjang 2019. Pandemi Covid-19 mengakibatkan wisatawan yang datang ke Indonesia menjadi merosot. Sektor-sektor pendukung pariwisata yaitu restoran, hotel hingga pengusaha retail juga terdampak akibat pandemi Covid-19. Keuntungan hotel mengalami penurunan hingga 40% sehingga berdampak pada operasional hotel dan mengancam kelangsungan bisnisnya. Turunnya pengunjung asing juga berpengaruh terhadap pendapatan rumah makan atau restoran yang pelanggannya lebih dominan adalah para pengunjung dari luar negeri. Lemahnya pertumbuhan pariwisata juga berdampak pada industry retail. Adapun daerah yang sektor retailnya paling terdampak adalah Jakarta, Medan, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Manado, dan Bali.¹

Dengan melihat dari banyaknya dampak yang hampir seluruh sektor merasakan dampak dari pandemi Covid-19, khawatir Indonesia akan kembali merasakan krisis seperti pada tahun 1998 lalu. Oleh karena itu, untuk memperkecil dampak dari pandemi Covid-19. Perlu adanya penanganan yang cepat dan tepat, agar mengurangi resiko kerugian yang cukup besar untuk seluruh wilayah Indonesia, dalam menangani kasus ini tentu diperlukannya koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menangani pandemi Covid-19. Khususnya di Jakarta yang menjadi Ibu kota Republik Indonesia, sebagai Ibu kota tentunya Jakarta memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong perekonomian nasional, Jakarta memberikan sumbangan yang cukup besar dan cukup berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Karena Jakarta memiliki peran sebagai pusat kegiatan perekonomian, dan juga sebagai pusat pemerintahan.

Provinsi DKI Jakarta, Jabar, Jateng, dan Jatim merupakan provinsi-provinsi dengan jumlah kasus terkonfirmasi positif yang besar di Indonesia. Hal tersebut membuat tantangan dan persoalan dalam penanganan pandemi Covid-19 keempat provinsi juga tidak mudah. Hal tersebut membuat tantangan dan persoalan dalam penanganan pandemic Covid-19 keempat provinsi juga tidak mudah. Respons dan

¹ Dito Aditia Darma Nasution, Erlina, Iskandar Muda. 2020. "*Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*". Jurnal Benefita, Volume 5, Nomor 2, Juli 2020. Hal 214

kebijakan masing-masing daerah akan menentukan sejauh mana penanganan pandemi dan dampaknya pada banyak aspek²

Dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia, berdasarkan laporan dari Satgas Covid-19 pertanggal 20 November 2020, Provinsi Jakarta memiliki jumlah kasus terbanyak di Indonesia, dengan persentase sebesar 25,4% diikuti dengan Jawa Timur dengan persentase 11,9%, dan Jawa Barat sebesar 9,6%. Tingginya kasus yang terjadi di DKI Jakarta sebagai provinsi penyumbang terbanyak atas kasus konfirmasi Covid-19 di Indonesia.³

Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam oleh pemerintah Indonesia, pemerintah mengatakan bahwa Covid-19 merupakan jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan bagi dunia maupun bagi Indonesia. Penetapan sebagai bencana non-alam ini dengan melihat penyebaran virus yang cepat dan dampak negatif yang tinggi yang dirasakan oleh korban, meningkatnya jumlah korban yang terpapar, kerugian harta benda, perluasan penyebaran yang cepat dari suatu daerah ke daerah lainnya, serta dampak negatif pada aspek sosial ekonomi yang terjadi di Indonesia.

Covid-19 bukanlah permasalahan yang sepele bagi Indonesia, virus mematikan ini telah berhasil merenggut ribuan nyawa masyarakat Indonesia yang terpapar virus ini, virus ini juga berhasil mematikan pergerakan individu, pemerintah, maupun organisasi lainnya. Banyak program-program penting yang tertunda akibat adanya pandemi Covid-19 ini yang belum diketahui sampai kapan virus ini menyebar di dunia dan di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun begitu, perlu adanya penanganan untuk mengurangi dampak negatif yang didapatkan karena pandemi Covid-19 ini, sehingga perlahan aktivitas dan kegiatan masyarakat maupun pemerintah dapat kembali terlaksana meskipun harus mengikuti protokol kesehatan.

² Ridho Imawan Hanafi, Imam Syafii, Mario Surya Ramadhan, Pandu Prayoga. 2020. Kepemimpinan Lokal Di Masa Pandemi Covid-19: Respons, Kebijakan, dan Pangung Elektoral. *Jurnal Penelitian Politik*. Volume 17. Nomor 2. Desember 2020. Hal 197

³ Meilinda Triana Pangaribuan, Adis Imam Munandar. 2021. Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta Menangani Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Volume 14. Nomor 1. Januari 2021. Hal 2

Dalam menangani krisis kesehatan seperti pandemi Covid-19, sangat diperlukan adanya keterlibatan dari berbagai level pemerintahan, masyarakat, dan organisasi-organisasi yang ada di Indonesia. Karena disaat seperti ini sangat rentan untuk mengalami krisis, apabila pemerintahan terpolarisasi dan kepemimpinan yang buruk akan memperkeruh keadaan dimasa sulit seperti ini, dan kemungkinan terjadinya krisis ekonomi dan kemanusiaan akan sangat besar terjadi jika konsep pemerintahan negara tersebut buruk. Selain itu, pengelolaan komunikasi yang baik, perumusan kebijakan, serta kecepatan pengeksekusian terhadap pandemi Covid-19 ini juga menjadi elemen yang penting dalam pembangunan serta pengoperasian kedaruratan kesehatan publik. Sehingga, masyarakat yang terpapar atau bahkan masih suspect Covid-19 dapat ditangani lebih cepat, sehingga dapat memperkecil adanya korban jiwa akibat terpapar virus SARS CoV 2 ini.

Kapasitas negara yang mumpuni dibutuhkan pada situasi krisis. Kapasitas negara (*state capacity*) dapat diartikan sebagai kemampuan sebuah negara tidak hanya dalam merumuskan atau membuat sebuah kebijakan, tetapi juga tentang kemampuan mengimplementasikan kebijakan yang memiliki legitimasi kuat guna mencapai pemenuhan kebutuhan masyarakat, seperti keamanan dan ketertiban serta kesejahteraan. Kapasitas negara yang dibutuhkan ketika waktu krisis tidak sama dengan waktu normal. Kapasitas krusial yang harus dimiliki negara dalam manajemen krisis adalah kemampuan memobilisasi sumber daya dalam jumlah besar dengan waktu singkat ke setiap wilayah yang paling membutuhkan bantuan.⁴

Wabah dan dampak serta penanggulangan yang seharusnya dapat dilaksanakan secara efektif justru sebaliknya. Masyarakat yang tengah mengalami kegalauan akibat wabah, terdapat perbedaan dalam penanganan antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat. Perbedaan cara penanganan menyebabkan konflik antara Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat. Alfian alfian dalam editorial Tempo menuliskan persoalan wabah membutuhkan politik pandemi di

⁴ Ridho Imawan Hanafi, Imam Syafii, Mario Surya Ramadhan, Pandu Prayoga. 2020. Kepemimpinan Lokal Di Masa Pandemi Covid-19: Respons, Kebijakan, dan Pangung Elektoral. Jurnal Penelitian Politik. Volume 17. Nomor 2. Hal. 198

Indonesia itu antara lain tampak pada bagaimana pemerintah pusat dan daerah berupaya saling bersinergi, hingga pilihan strateginya. Sistem hubungan pemerintah pusat dan daerah juga menjadi catatan penting dalam efektivitas koordinasi politik pandemi. Isu jorjoran popularitas antar-tokoh politik memang sering kali tak terelakkan. Secara umum, tidaklah etis bila perbincangan diarahkan ke politik kontestasi elektoral pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden. Jauh lebih penting ialah agar semua pemimpin di pusat dan daerah hadir dan efektif kepemimpinannya.⁵

Presiden Jokowi menekankan bahwa kepala daerah tidak bisa menerapkan konsep lockdown dalam penanganan Virus Corona (Covid-19). "Perlu saya tegaskan yang pertama bahwa kebijakan lockdown baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah," kata Jokowi, Senin. Jokowi mengatakan, pemerintah tidak akan mengambil opsi lockdown. Pemerintah pusat lebih mengedepankan cara menjaga jarak dan mengurangi kerumunan massa. Sebab, kerumunan massa bisa membawa risiko lebih besar dalam penyebaran Covid-19. Presiden menegaskan, dirinya terus memonitor penanganan Covid-19. Ia mengatakan, kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus ditelaah dengan baik untuk menyelesaikan masalah dan tidak memperburuk keadaan.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah:

- a. Apa kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan Covid-19 di Jakarta Pada Tahun 2020-2021?
- b. Bagaimana implementasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan Covid-19 di Jakarta Pada Tahun 2020-2021?

⁵ M. Alfian Alfian, Politik Pandemi, *Tempo*, Senin, 23 Maret 2020

1.3. Pembatasan Masalah

Melihat banyaknya sejumlah wilayah di Indonesia yang terkena dampak akibat adanya pandemi Covid-19, untuk menghindari pembahasan yang lebih luas maka peneliti membatasi penelitian ini Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dalam Upaya Pencegahan, Penanganan, dan Pemulihan Covid-19 di Jakarta Pada Tahun 2020-2021.

1.4. Rumusan Masalah

Peneliti memfokuskan penelitian ini kepada kajian Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dalam Upaya Pencegahan, Penanganan, dan Pemulihan Covid-19 di Jakarta Pada Tahun 2020-2021.

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kebijakan apa saja yang telah diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan Covid-19 di DKI Jakarta pada tahun 2020-2021.
2. Untuk mengetahui seberapa efektif kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan Covid-19 pada tahun 2020-2021.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada penelitian lebih lanjut terkait relasi pemerintah dalam menangani dan memulihkan daerah dari suatu wabah penyakit.
2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam studi kebijakan penanganan dengan masalah wabah penyakit.